

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PONTIANAK

Nomor 145 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KINERJA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TAHUN 2023

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Perubahan Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2021-2024 yang berdampak pada perubahan perencanaan kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tahun 2023 yang telah disusun, perlu adanya perubahan pada Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang Perubahan Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1995 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1997 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
8. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 2466 Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024.
10. Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Nomor 143 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2021 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2023 yang merupakan perubahan perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak selama Tahun 2023;
- KEDUA : Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2023 ini mengacu kepada matriks Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2021-2024;
- KETIGA : Penetapan Perubahan atas Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2023 ini terdiri dari perubahan sasaran dan indikator kinerja Balai;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 30 Oktober 2023

Kepala Balai

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA" at the top and "BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK" at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized logo. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that reads "Agung Budi Lestari".

Tembusan :

1. Sekretaris BSKJI
2. Inspektur Jenderal
3. Ka. Biro Perencanaan



RENCANA KINERJA

BSPJI PONTIANAK

TAHUN 2023

(Revisi 02)



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK

Jl. Budi Utomo No. 41 Telp. (0561) 881393, 884442, Fax. (0561) 881533 Pontianak 78243

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak Tahun 2021 – 2024. RENKIN BSPJI Pontianak Tahun 2023 ini kemudian direvisi dikarenakan adanya perubahan Rencana Strategis dari Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak. RENKIN BSPJI Pontianak disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penyusunan RENKIN BSPJI Pontianak tahun 2023 dimaksudkan sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan dilaksanakan dan diwujudkan sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Pontianak, Oktober 2023
Kepala BSPJI Pontianak

Agung Budi Lestari

The stamp is circular with a purple border. The text inside the border reads "KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA" at the top and "BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK" at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized logo consisting of a gear and a person figure.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4
A. HASIL PEMBANGUNAN DIBIDANG INDUSTRI	4
B. ARAH PEMBANGUNAN.....	6
BAB III RENCANA KINERJA	10
A. SASARAN.....	10
B. INDIKATOR KINERJA	10
BAB IV PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2023 14

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja (RENKIN) merupakan dokumen yang menjabarkan mengenai rencana kinerja suatu organisasi, yang dijadikan pedoman dalam menetapkan kegiatan tahunan organisasi tersebut dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja (RENKIN) BSPJI Pontianak memuat kebijakan teknis operasional secara rinci dan terukur yang akan menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023. Selain itu RENKIN juga merupakan suatu perencanaan untuk mencapai target, sasaran serta rencana guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan sektor industri mengacu pada arah kebijakan industri nasional sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2008. Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah. Proses pembangunan industri akan diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya aspek pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi.

Berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut, maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak diharapkan akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian khususnya melalui kegiatan pelayanan bantuan teknis antara lain pendampingan teknologi proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga profesi tertentu, standarisasi dan pengujian produk, dan penanggulangan limbah industri terutama untuk industri kecil dan menengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja ini adalah untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan acuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, mewajibkan setiap satker menyusun dan menyampaikan Rencana Kinerja. Rencana Kinerja

BSPJI Pontianak merupakan penjabaran dari Renstra BSPJI Pontianak sekaligus sebagai gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, berdasarkan ruang lingkup tugasnya dalam pencapaian visi dan misi.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Terbentuknya Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak berawal dari sebuah Proyek Riset/ Penelitian Teknologi Industri BPPI pada tahun 1981. Pada tahun 1984 proyek tersebut diserahkan dan dikelola oleh Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Kalbar dengan nama Proyek Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 14/M/SK/2/1991 tanggal 19 Pebruari 1991 tentang Pembentukan 4 (empat) Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, terbentuklah Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1991. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 784/MPP/SK/11/2002 tanggal 29 Nopember 2002 nama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Pontianak dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan, namun dengan adanya pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni 2006, struktur organisasi ditata kembali dan namanya dirubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak. Kemudian pada tahun 2022 berdasarkan Permenperin No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, struktur organisasi kembali ditata dan berubah nama kembali menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak. Lembaga ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, BSPJI Pontianak mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dan dalam melaksanakan tugas, BSPJI Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;

- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tersebut dijabarkan kedalam program kegiatan yang mengacu pada kebijakan pengembangan industri nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.

D. RUANG LINGKUP

Rencana kinerja BSPJI Pontianak tahun 2023 memuat hasil-hasil yang akan dicapai oleh BSPJI Pontianak, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. HASIL PEMBANGUNAN DIBIDANG INDUSTRI

Pembangunan Industri Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu motor penggerak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi Industri Kalbar berdasarkan BPS 2017 dan Sensus Ekonomi 2016 menggambarkan terdapat 39.065 Unit Industri Pengolahan. Sedangkan merujuk pada Kalbar Dalam Angka 2019 terdapat 147 Unit/Perusahaan dalam skala Industri Besar Sedang. Industri Mikro Kecilnya sendiri ada 38.918 Unit, dengan diperkirakan lebih dari 76.000 UMKM yang tersebar dalam 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. 9 IKM Kalbar yang telah tersertifikasi sebagai One Village One Product (OVOP) dari Kementerian Perindustrian yakni 4 OVOP bintang III, 4 OVOP bintang II dan 1 OVOP bintang I, yang terdiri dari produk pangan (lempok Durian, Amplang dan Aneka Produk Pangan Aloe Vera) dan 1 produk Keramik Hias.

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami sedikit penurunan karena dipengaruhi oleh penurunan industri kayu dan hasil hutan lainnya serta masih lambatnya pertumbuhan subsektor industri lainnya. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan non-migas dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar sebesar 16,85% pada tahun 2014, 16,63% pada tahun 2015, 16,50% pada tahun 2016 dan 16,16% pada tahun 2017. Dalam RPJMD Kalbar, pertumbuhan ekonomi Kalbar sekitar 6 persen. Perekonomian Kalbar dilihat dari data tahun 2017 masih didominasi oleh subsektor Industri Makanan dan Minuman yang mencapai nilai 74,91%. Industri pengolahan Bauksit (Alumina) logam dasar, baru menyumbang kontribusi 27,67%.

Perkembangan Nilai Ekspor Barang Asal Kalimantan Barat tahun 2015-2017 dengan nilai total ekspor Kalbar mencapai US\$516 juta tahun 2015, US\$561 juta tahun 2016, US\$1.373 juta meningkat secara signifikan pada tahun 2017 namun angka tersebut US\$558,9 juta atau sekitar 40,7% diekspor dari Provinsi lain. Artinya kinerja ekspor Kalbar sebenarnya cukup tinggi, namun diekspor dalam jumlah besar dari pelabuhan di luar Kalbar, sehingga tidak tercatat di Statistik Kalbar tapi tercatat di Statistik Nasional. Maka fokus peningkatan ekspor Kalbar adalah bagaimana meningkatkan ekspor baik jenis komoditas/ produk yang diekspor maupun negara tujuan ekspor melalui perbatasan/ batas negara, peningkatan peran ekspor UKM/IKM, serta mutu produk yang dihasilkan dari IKM tersebut.

Berdasarkan data tersebut di atas maka diperlukan peran serta BSPJI Pontianak yang berdomisili di Kalimantan Barat sebagai Unit Pengelola Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang

mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Untuk mendukung perkembangan industri di Kalbar, setiap tahunnya BSPJI Pontianak membuat program kegiatan yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan industri di Kalbar, serta melaksanakan perjanjian kinerja dengan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Pada tahun 2021, terdapat Reorganisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang namanya berubah menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, dimana tidak boleh adanya lagi fungsi penelitian dan pengembangan di Kementerian, karena sesuai kebijakan pemerintah bahwa fungsi kelitbangan sudah dijadikan satu di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu sebagai unit kerja di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Riset dan Standardisasi Pontianak sudah berganti nama menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak dan sudah tidak memiliki lagi fungsi kelitbangan. Hal ini menyebabkan perubahan pada Rencana Strategis BSKJI tahun 2021 – 2024 dan Rencana Strategis BSPJI Pontianak Tahun 2021 – 2024, dan mengakibatkan perubahan pada perjanjian kinerja BSPJI Pontianak. Selama tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024, berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dalam perubahan kedua Renstra 2021 – 2024, dan perubahan perjanjian kinerja (Perkin) tahun berjalan, maka sasaran yang akan dicapai BSPJI Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing industri pengolahan non migas

- a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

- a. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0
- b. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri

3. Meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri

- a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi
- b. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri
- c. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
- d. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

4. **Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**
 - a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
5. **Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan**
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
6. **Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional**
 - a. Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN
7. **Penguatan Layanan Publik**
 - a. Nilai minimal indeks layanan publik
8. **Penguatan Akuntabilitas Organisasi**
 - a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
 - b. Nilai minimal laporan keuangan

B. ARAH PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 6,0 persen per-tahun, melalui peningkatan produktivitas industri, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per-kapita (*atlas method*) diharapkan meningkat menjadi USD6.010 per-kapita pada tahun 2024. Skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024 dimulai 5,3% pada tahun 2020, 5,5% pada tahun 2021, 5,9% pada tahun 2022, menembus 6,3% tahun 2023 dan pada tahun 2024 diharapkan mencapai 6,8%. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Harapan pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi ini utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi produk pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Revitalisasi industri dilakukan dengan memperbaiki lingkungan usaha yang mendukung modernisasi industri, termasuk melalui penerapan industri 4.0.

Saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi,

digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pengembangan IKM seiring berkembangnya *e-commerce*, inklusi keuangan melalui *financial technology* dan pemerintahan melalui *e-government*. Industri 4.0 tentu akan mengarah pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas, memastikan *downtime* minimum, SOP yang konsisten dan analisis prediktif/peramalan. Perangkat kontrol operasi khusus untuk jalur pemrosesan, supervisor dapat memelihara parameter proses yang optimal, mendeteksi kesalahan dari alarm pop up sehingga memungkinkan respon cepat, *virtual reality* untuk lebih dekat dalam mengamati dampak dari perubahan parameter ke situasi nyata.

Strategi peningkatan kinerja industri di Kalimantan Barat dengan melakukan diversifikasi produk/ komoditi ekspor ke negara tujuan dengan arah kebijakan yakni menguatkan pengelolaan data/ informasi potensi dan fasilitasi peningkatan ekspor daerah terutama UKM dan daerah perbatasan yang didukung ketersediaan data dan analisis aktivitas importasi Kalbar untuk peningkatan sektor produksi dan ketersediaan Bahan Pokok yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi di Kalbar tahun 2016-2020 (data BPS Nasional) secara umum dapat dilihat dari pertumbuhan produksi tahunan Y on Y pada tahun 2016 sebesar 1,83; tahun 2017 sebesar 3,98; tahun 2018 sebesar 7,54; tahun 2019 sebesar 4,13 dan tahun 2020 sebesar -15,83 karena Pandemi Covid-19. Perspektif kebijakan daerah terkait pengembangan industri di Kalimantan Barat memiliki 7 industri unggulan untuk dikembangkan, yakni Industri Pengolahan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Kelapa, Industri Pengolahan Bauksit, Industri Pengolahan Kayu, Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Industri Pengolahan Hasil Laut Perikanan. Selain itu, Pemerintahan Provinsi juga mengandalkan harapan pengembangan industri tambang Alumina di Kalbar dalam rangka peningkatan nilai tambah bijih Bauksit.

Kerangka kegiatan pendukung dalam meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi industri/ meningkatkan nilai tambah dengan memperluas pemasaran dan daya saing produksi industri. Cara yang bisa ditempuh adalah identifikasi produk yang diminati negara luar, fasilitasi penerapan standarisasi dan sertifikasi produk, dan promosi produk industri. Cara yang selanjutnya dengan meningkatkan inovasi, kapasitas dan efisiensi proses produksi, dengan optimasi dukungan daerah pada program-program Kemenperin seperti restrukturisasi mesin, program smart IKM dan implementasi industri 4.0. Selain itu, fasilitasi dan networking peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan BSPJI Pontianak. Melihat kondisi yang terjadi saat ini tentunya perlu adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya kondisi sektor industri di daerah

Kalimantan Barat. Sehingga arah perkembangan industri Kalimantan Barat dapat mendukung pertumbuhan industri secara nasional.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa – jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. (*sumber: Renstra BSKJI 2021 – 2024*)

Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia adalah menjadi Negara Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada tahun 2025. Visi inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Kementerian Perindustrian dan Satuan Kerja yang ada di bawahnya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri. Dalam rangka mewujudkan visi nasional tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian, saat ini khususnya melalui pemberian layanan jasa kepada industri dan masyarakat.

Sejak awal Tahun 2002, Otonomi Daerah sudah mulai dilaksanakan secara penuh. Dengan diberlakukannya Otonomi daerah tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa

Industri Pontianak yang berada dibawah koordinasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri akan lebih dituntut keberadaannya, disamping melayani kebutuhan Pemerintah daerah juga memberikan pelayanan jasa kepada dunia usaha industri di daerah, dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI, seperti belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi di industri, ketergantungan terhadap bahan baku impor (sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia), kalah saingnya sektor IKM dikarenakan belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana dan kelemahan legalitas usaha.. Sebagai salah satu UPT di lingkungan BSKJI, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak berperan sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin serta hasil produk. Selain itu berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor. Berikutnya, sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI yang berada di daerah, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

BAB III RENCANA KINERJA

A. SASARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan di sektor industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak diharapkan akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian khususnya melalui kegiatan pelayanan bantuan teknis antara lain pendampingan teknologi proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga profesi tertentu, standarisasi dan pengujian produk, dan penanggulangan limbah industri terutama untuk industri kecil dan menengah. Adapun Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023, telah ditetapkan di dalam Matriks Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak tahun 2021 – 2024, yaitu :

1. *Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas.*
2. *Penguatan implementasi making Indonesia 4.0.*
3. *Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.*
4. *Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien.*
5. *Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan*
6. *Terwujudnya ASN BSKJI yang professional.*
7. *Penguatan Layanan Publik.*
8. *Penguatan Akuntabilitas Organisasi*

B. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, maka perlu ditentukan indikator kinerja yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja utama BSPJI Pontianak yaitu terdapat pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Sasaran Kegiatan 1 hingga Sasaran Kegiatan 3.

Demi mencapai tujuan dan sasaran program, kemudian disusunlah Sasaran Kegiatan sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri;
4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan;
6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional;
7. Penguatan Layanan Publik;
8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi.

Dari kedelapan sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja pada tahun 2023, yaitu :

1. Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja :

- a. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi dengan satuan Persen. Dengan output/outcome indikator kinerja yaitu keberhasilan kolaborasi yang diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri

2. Sasaran Kegiatan II: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja :

- a. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0. Dengan output/outcome indikator kinerja yaitu kesiapan industri dalam menerapkan teknologi industri 4.0. Fasilitasi yang dilakukan dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, *awareness* industri 4.0 dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0
- b. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri. Dengan *Output/outcome* indikator kinerja ini adalah perusahaan industri yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri. Fasilitasi tersebut dapat berupa pendampingan, konsultasi dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses dan standar berkelanjutan) dalam upaya penguatan *Making Indonesia* 4.0.

3. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri. Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki lima indikator kinerja:

- a. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dengan satuan Persen. Dengan output/ outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).
- b. Meningkatnya PNBP layanan jasa industri dengan satuan Persen. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan jumlah PNBP layanan jasa industri yang diberikan oleh Balai. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang

diselenggarakan oleh Balai di lingkup BSKJI, diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.

- c. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan jumlah hasil layanan jasa yang diberikan oleh Balai.
- d. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dengan satuan Persen. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa.

4. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dengan satuan Persen. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah hasil tindaklanjut pengawasan internal.

5. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri dengan satuan Indeks; Output/ outcome indikator kinerja ini adalah meningkatnya kepuasan pelanggan atas pelayanan Lembaga Penilai Kesesuaian yang ada di BSPJI Pontianak, dan kenaikan jumlah penerimaan PNBPN di BSPJI Pontianak.

6. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Indikator kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Rata-rata indeks profesionalitas ASN dengan satuan Indeks. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN.

7. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja sasaran pada tahun ini memiliki satu indikator kinerja:

- a. Nilai minimal indeks layanan publik dengan satuan Indeks. Dengan output/outcome indikator kinerja ini adalah capaian nilai indeks layanan publik pada layanan jasa teknis yang telah diberikan.

8. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Indikator Kinerja sasaran pada tahun ini memiliki dua indikator kinerja:

- a. Nilai minimal akuntabilitas kinerja dengan satuan Nilai; output/outcome indikator kinerja ini adalah tercapainya nilai minimal akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja di BSPJI Pontianak. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
- b. Nilai minimal laporan keuangan dengan satuan Nilai; output/outcome indikator kinerja ini adalah terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akurat di BSPJI Pontianak.

Secara rinci Indikator kinerja, output/outcome, target yang ditetapkan serta kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 1. Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2023.

Tabel 1 Indikator Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan oleh industri	25 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Industri Hijau pada IKM Bimbingan Fasilitasi Persiapan Penerapan Industri Halal pada Industri Pangan Klinik Teknologi Berjalan Kalbar
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Kesiapan industri dalam menerapkan teknologi industri 4.0	1 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Penerapan Teknologi Cloud Computing pada Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Self Assessment INDI 4.0 pada Industri
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan industri yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1 Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan SNI dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu IKM di Bidang Pangan dalam rangka Penerapan SNI
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan	30 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan Pengawasan Bahan Baku Melalui Pengenalan Teknologi 4.0 (Program DAPATI)
		Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Peningkatan jumlah PNBP layanan jasa industri yang diberikan oleh Balai	2 Persen	<ul style="list-style-type: none"> Promosi BSPJI Pontianak Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> • Business Gathering BSPJI Pontianak • Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak • Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk • Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu BSPJI Pontianak • Pelaksanaan dan Monitoring K3 di Lingkungan BSPJI Pontianak
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Peningkatan jumlah hasil layanan jasa yang diberikan oleh Balai	2 Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi • Pengawasan Standardisasi Industri • Penyelenggaraan Sertifikasi Produk • Penyelenggaraan Laboratorium Penguji • Kerjasama Konsultasi Teknologi Industri • Bimbingan Teknis dan Pendampingan Industri
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	70 Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi • Pengadaan Inventaris Lainnya • Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya • Pengadaan Alat Laboratorium

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Hasil tindaklanjut pengawasan internal	100 Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SPIP
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Meningkatnya kepuasan pelanggan atas pelayanan Lembaga Penilai Kesesuaian yang ada di BSPJI Pontianak	3,6 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Majalah Semipopular Industri • Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	Nilai rata-rata indeks profesionalitas ASN	72 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Gaji, Tunjangan, Uang Makan dan Uang Lembur • Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Capaian nilai indeks layanan publik pada layanan jasa teknis yang telah diberika	4,1 Indeks	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Pemeliharaan Kantor • Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan BSPJI Pontianak • Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan BSPJI Pontianak
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Tercapainya nilai minimal akuntabilitas kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja	77 Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja • Monitoring Triwulan ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya • Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output/ Outcome	Target	Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak
		Nilai minimal laporan keuangan	Terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akurat di BSPJI Pontianak	94 Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja merupakan salah satu target yang harus dicapai guna mewujudkan rencana strategis BSPJI Pontianak selama periode tahun 2021 – 2024. Perwujudan ini dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang secara umum ditetapkan juga dalam rangka pelaksanaan tujuan BSKJI.

Penyusunan Rencana Kinerja BSPJI Pontianak Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh unit yang ada di lingkungan BSPJI Pontianak untuk Tahun Anggaran 2023. Seluruh unit berupaya baik secara bersama-sama maupun secara mandiri untuk mencapai tujuan BSPJI Pontianak tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kerja masing-masing unit yang berpedoman pada kerangka kerja rencana strategis BSPJI Pontianak periode tahun 2021 – 2024.

Peningkatan penerapan teknologi industri kepada dunia usaha dan pemberdayaan kebijakan internal BSKJI diwujudkan oleh masing-masing unit di lingkungan BSPJI Pontianak kedalam rencana kerja kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2023.

LAMPIRAN

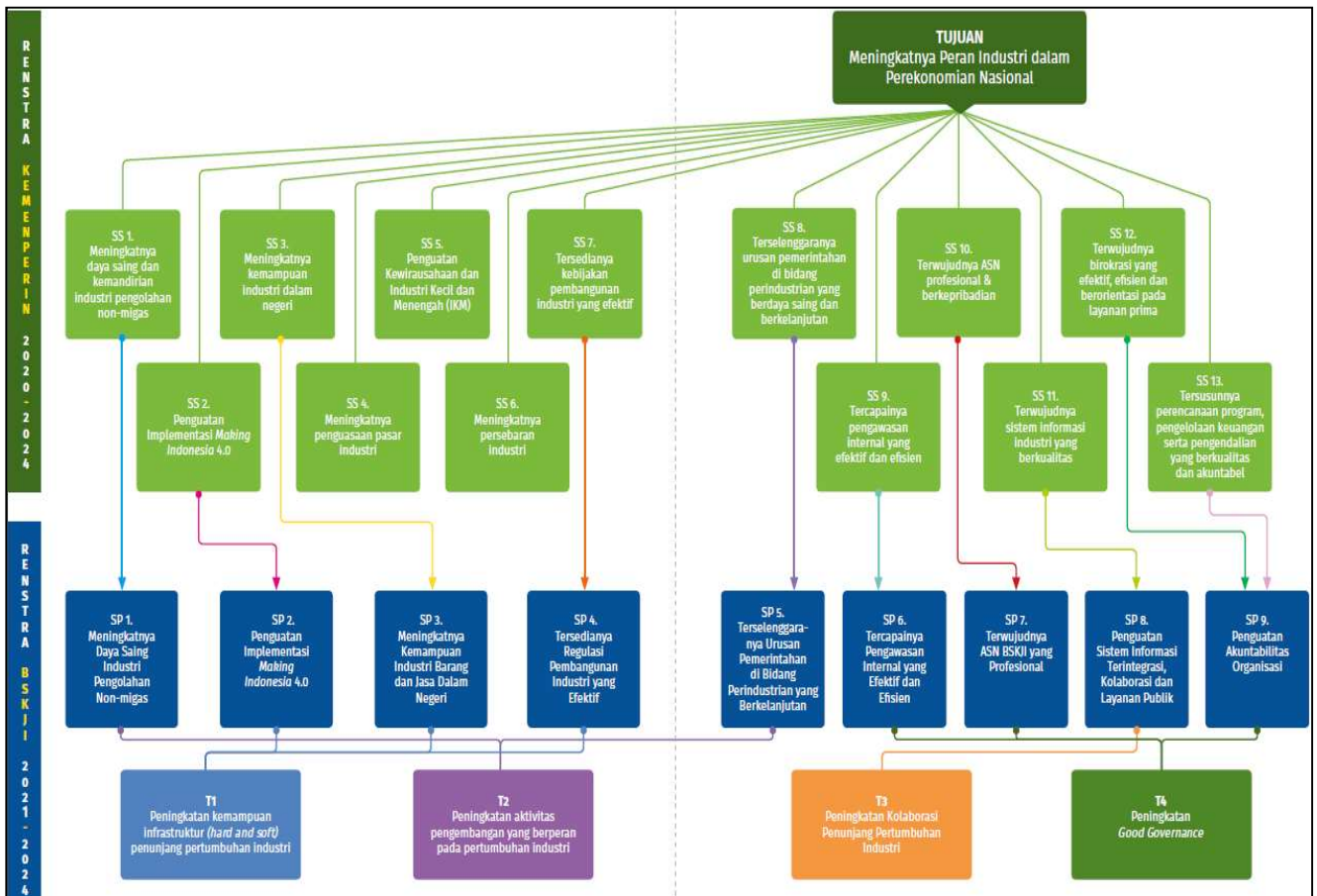
Lampiran 1

RENCANA KINERJA

Satuan Kerja : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak
 Tahun : 2023
 Program : - Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan non migas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	25 Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1 Perusahaan
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1 Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	30 Persen
		Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	2 Persen
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2 Persen
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	70 Persen
4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata - rata Indeks Profesionalitas ASN	72 Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	4,1 Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	94 Nilai

Lampiran 2. Pohon Kinerja BSPJI Pontianak 2021 – 2024



Lampiran 3. Peta Strategis BSPJI Pontianak 2021 - 2024

